BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Otonomi Daerah yang bergulir dewasa ini melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan menempatkan kabupaten / kota sebagai titik berat otonomi daerah, memberi harapan bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pelayanan. Kebijakan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dibanding bila diformulasikan secara sentralistis.

Dalam upaya mensukseskan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, sudah tentu diperlukan aparatur pemerintah yang makin baik dan mengerti terhadap berbagai keinginan masyarakat terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Di sisi lain juga diharapkan mampu memperbaiki citra aparatur pemerintah yang beberapa dasawarsa terakhir banyak bernilai negatif dan telah kehilangan legitimasi di masyarakat.

Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi fenomena tersendiri yang harus dipenuhi oleh organisasi pemerintah. Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggara kepemerintahan yang baik meliputi partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, memiliki orientasi pada

concensus, berkeadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, bervisi strategi, serta adanya saling keterkaitan. Tuntutan masyarakat tersebut hanya dapat diwujudkan dangan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda Propinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan sebagian tugas pokok pemerintahan dan pembangunan dalam bidang penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, maka Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara harus memiliki tenga ahli di bidang administrasi, keuangan, perencanaan program, kearsipan dan lain-lain. Fungsi penyuluhan hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum menuntut tersedianya tenaga-tenaga penyuluh hukum yang handal, pegawai yang mengerti tentang aturan hukum yang berlaku.

Fungsi pelayanan kemasyarakatan hanya dapat dilaksanakan dengan optimal apabila pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negera tersedia pegawai yang ahli dalam penelitian, pembinaan dan pembimbingan tenaga hukum dan ahli dalam mengelola program-program pendidikan kegiatan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari rumah penyimpanan benda sitaan negara Klas I Samarinda.

Sebagai sebuah organisasi yang mempunyai tugas memberikan pelayanan terhadap masyarakat, rumah penyimpanan benda sitaan

negara Klas I Samarinda haruslah mampu mengelola sumber daya manusia agar dapat memberikan hasil terbaik dalam hal memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

Oleh karenanya perlu ada upaya agar Pegawai rumah penyimpanan benda sitaan negara Klas I Samarinda dapat dan mampu berfikir kreatif dengan keterbatasan yang ada, menemukan hal-hal yang baru (inovatif), tidak hanya menunggu pekerjaan (proaktif), bekerja sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ditetapkan (sistematik), berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien) serta dapat bekerja dengan cepat, tepat, ekonomis dan hasil yang maksimal.

Peningkatan kompetensi pegawai pada sebuah organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu diantaranya adalah melalui partisipasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan pegawai adalah sebuah proses pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja. Dalam pendidikan diberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap, sedangkan dalam kegiatan pelatihan bertujuan untuk memperoleh keterampilan agar seorangpegawai mampu meningkatkan kinerjanya dalam organisasi.

Rumah penyimpanan benda sitaan negara klas I samarinda merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai peranan sangat penting dalam roda pemerintahan khususnya dalam hal

penegakan hukum dan Hak asasi manusia. Oleh karena itu lembaga tersebut perlu memiliki pengelolaan kepegawaian yang baik.

Kelancaran tugas para pegawai rumah penyimpanan benda sitaan negara Klas I Samarinda sangat tergantung pada kesempurnaan aparaturnya. Karena itu dalam rangka mencapai tujuan nasional yakni mewujudkan masyarakat yang madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi di perlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas ebagi abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat.

Konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah tersebut adalah persiapan sumber daya manusia di daerah, terutama aparatur pemerintah daerah, untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan masyarakat sebagai dampak diterapkannya otonomi daerah. Dalam hal ini, reformasi terhadap aparatur pemerintah daerah merupakan satu keharusan, melihat kenyataan selama ini bahwa birokrasi di daerah cenderung tidak efisien dan tidak efektif serta kurang mandiri.

Disamping itu, perkembangan lingkungan stratejik nasional, regional dan global yang kompleks dan dinamis menuntut Indonesia untuk merubah paradigma pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan layanan kepada masyarakat. Perubahan paradigma tersebut mengacu pada terselenggaranya pemerintahan yang baik

(*good governance*) yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik tersebut, maka reformasi sistem kelembagaan pemerintahan yang terdiri atas struktur organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya aparatur (kepegawaian) merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pengaturan sistem kelembagaan pemerintahan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Sumber daya aparatur sebagai salah satu bagian dari sistem kelembagaan pemerintahan merupakan faktor yang amat strategis untuk menggerakkan roda pemerintahan dan menentukan terselenggaranya sistem pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, penanganan masalah sumber daya aparatur dalam menata sistem kelembagaan pemerintahan dalam rangka membangun pemerintahan yang baik merupakan isu sentral di berbagai daerah di Indonesia.

Salah satu langkah penting menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi adalah dengan menjalankan fungsi manajemen pemerintahan yang lebih berorientasi pada penggunaan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas serta penumbuhan etos kerja aparatur secara terprogram.

Dalam rangka memperoleh sumber daya yang berkualitas diperlukan beberapa dimensi meliputi : apa yang akan mereka peroleh, dimana diperoleh, bagaimana untuk mendapatkan perhatian mereka peroleh, bagaimana menyeleksi mereka, bagaimana melaksanakannya dan apa yang harus dilaksanakan manakala mereka mulai bekerja.

Pendidikan dan Pelatihan sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dan bersifat sentral, karena hal ini sangat menentukan keberhasilan dan kemajuan suatu organisasi atau lembaga serta sekaligus dapat menentukan citra positif atau kepercayaan semua pihak terhadap organisasi atau lembaga tersebut. Dalam era reformasi kepercayaan terhadap manusia ternyata dianggap lebih tinggi nilainya, karena masyarakat sebagai pelanggan atau yang dilayani oleh pemerintah termasuk dalam menyelesaikan suatu krisis, meyakini bahwa lebih penting siapa yang melakukannya bukan apa yang diperolehnya.

Dalam kelangsungan suatu pemerintahan peran administrasi adalah sangat menentukan, tapi lebih menentukan lagi dari administrasi yaitu manusianya. Baik buruknya administrasi sangat tergantung pada manusia yang ada di dalamnya. Demikian juga manusia itu sangat tergantung pada kualitas atau prestasi kerja yang akan dicapainya, karena dengan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya, maka proses administrasi berjalan baik serta tujuan dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Maka dari itu tidak berlebihan jika peran aparatur pemerintah sebagai agen perubahan yang utama, baik sebagai perencana maupun sebagai pelaksana pembaharuan, selayaknya mendapat perhatian yang utama dalam rangka peningkatan kualitas.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka daya dukung terhadap pemenuhan tuntutan dan kebutuhan tersebut diperlukan adanya sumber daya aparatur yang berkualitas. Oleh sebab itu upaya pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur perlu dilakukan secara sungguh-sungguh dan teratur.

Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh organisasi publik maupun organisasi swasta, jika mereka menginginkan organisasinya tumbuh dan berkembang, mampu menghadapi pesaing-pesaing, dapat memberikan pelayanan yang prima, dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia diharapkan dapat membantu organisasi memiliki orang-orang yang ahli, mempunyai pengetahuan, dan ketrampilan dalam melaksanakan tugas serta loyalitas terhadap instansi, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja. Hal tersebut akan berakibat pada peningkatan produktivitas organisasi secara keseluruhan.

Meningkatnya prestasi kerja pegawai yang diakibatkan oleh pendidikan dan pelatihan pegawai tersebut tidak hanya bermanfaat untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sekarang, akan tetapi juga

sebagai persiapan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar di masa yang akan datang.

Sebagai salah satu perangkat hukum, maka seluruh pegawai harus mempunyai dedikasi yang tinggi untuk memacu mengembangkan prestasi kerja di lingkungan kerja mereka masing-masing, sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam rangka penegakan hukum dan hak asasi manusia dapat dicapai dengan maksimal.

Untuk menghadapi hal tersebut di atas, maka sebagai lembaga Hukum dan Hak asasi manusia, rumah penyimpanan benda Sitaan Negara Klas I Samarinda harus menyiapkan perangkat kepegawaian yang dapat melayani secara profesional kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan dalam kepastian hukum, yaitu dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai. Secara konsepsional pendidikan dan pelatihan pegawai diharapkan mampu meningkatkan kinerja pegawai.

Berdasarkan hasil observasi sementara di obyek penelitian yaitu di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan masih belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari : (1) beragamnya minat aparatur untuk meningkatkan kemampuannya, meskipun banyak tawaran atau kesempatan untuk mengikuti diklat, seminar, workshop nampaknya belum semua aparatur menunjukkan responsibilitas yang tinggi, (2) Penempatan pegawai belum semuanya berdasarkan kualifikasi yang ditentukan berdasarkan

standar kompetensi (pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan sikap). (3) Pembinaan terhadap pegawai dilakukan tanpa adanya aturan/sistem yang jelas,

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai fenomena yang terjadi di obyek penelitian terutama terkait dengan pendidikan dan pelatihan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda dalam meningkatkan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berasumsi bahwa kinerja pegawai pada rumah penimpanan benda sitaan negara perlu untuk terus ditingkatkan melalui berbagai upaya. Salah satu hal yang penulis asumsikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja adalah faktor pendidikan dan pelatihan pegawai, sebagaimana dikemukakan oleh Kaho (2003) bahwa faktor pelaksana merupakan faktor utama yang sangat berpengaruh dalam hal pelaksanaan pencapaian tujuan organisasi. Pelaksana dalam hal ini adalah aparatur atau pegawai selaku anggota organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis bermaksud ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Implementasi kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda”.

B. Fokus Permasalahan

Dari berbagai permasalahan yang penulis uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:“ Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendidikan dan pelatihan pada rumah penyimpanan benda sitaan negara klas I samarinda

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademik

Hasil Penelitian diharapkan akan memperkaya pengembangan teori-teori Ilmu administrasi dan menjadi sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang belum terungkap dalam penelitian ini.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Klas I Samarinda dalam meningkatkan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur di lingkungannya dalam hal peningkatan kualitas aparatur di Rumah Penyimpaan Bneda Sitaan Negara Klas I Samarinda.